

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan deskripsi, analisis, dan pembahasan hasil penelitian. Deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan sekolah, deskripsi informan tentang implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang, dan pembahasan hasil penelitian.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yang berlokasi di Jln. Pabelan No.1 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini merupakan sekolah formal yang berstatus swasta berbasis Islam Terpadu. Sejak tahun 2006 sampai sekarang sekolah ini menerapkan sistem Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah tersebut berada di sebuah desa, tetapi tidak jauh dari jalan utama menuju objek wisata Candi Borobudur di Magelang. Gedung SMPIT Ihsanul Fikri menghadap ke selatan dan berada di tepi jalan desa sehingga jauh dari kebisingan serta tidak mengganggu berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan belajar berlangsung kondusif.

Saat ini SMPIT Ihsanul Fikri Magelang dipimpin oleh Drs. Moh Mohtar sebagai kepala sekolah. SMPIT Ihsnul Fikri merupakan sekolah dengan sistem *boarding school* (sekolah berasrama). SMPIT Ihsanul Fikri Magelang juga merupakan sekolah yang berbasis berbasis agama Islam. Penerapan *boarding school* merupakan upaya pendisiplinan pembelajaran siswa dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa yaitu kualitas akademik dan kualitas non-akademik dan basis Islam Terpadu ini diselenggarakan untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu qauliyah dan kauniyah melalui implementasi kurikulum serta proses belajar mengajar dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman dan islami.

1) Visi dan Misi SMPIT Ihsanul Fikri Magelang

Adapun visi dan misi dari SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yaitu :

a) Visi Sekolah

Optimalisasi Potensi, Meraih Prestasi, Menuju Ridho Ilahi

Indikator :

- Unggul dalam penanaman akhlaq.
- Unggul dalam prestasi akademik.
- Unggul dalam kecakapan hidup.
- Unggul dalam kemandirian.
- Unggul dalam kedisiplinan.
- Memiliki lingkungan sekolah yang kondusif dan Islami.

b) Misi Sekolah

- Menumbuhkan penghayatan yang mendalam terhadap dasar dan perilaku Islami serta budaya bangsa sehingga menjadi landasan akhlaq.
- Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan menyenangkan sehingga setiap siswa mampu menggali potensi untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- Menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan kecakapan hidup siswa sehingga mampu bertahan dan bersaing pada jejang yang lebih tinggi.
- Menyelenggarakan kegiatan yang memotivasi tumbuhnya kemandirian siswa dalam menyelesaikan masalah kehidupan.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan sikap disiplin.
- Melakukan perubahan inovatif terhadap lingkungan sehingga nyaman, kondusif dan Islami sebagai prasarana pembelajaran.

2) Kondisi Fisik Sekolah

SMPIT Ihsanul Fikri dengan luas lahan 16.798 m², yang terdiri dari 2 (dua) lantai, masing-masing lantai terdiri dari 13 (tiga belas) ruang pada lantai 1 (satu) dan 26 (dua puluh enam) ruang pada lantai 2 (dua). Komposisi ruang tersebut adalah:

a) Ruang belajar sebanyak 16 (enam belas) ruang, yang terdiri dari 13 (tiga kelas) ruang kelas dan 3 (tiga) ruang menggunakan ruang asrama untuk ruang kelas.

- Kelas VII terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas ikhwan dan 3 (tiga) ruang kelas akhwat.
- Kelas VIII terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas ikhwan dan 3 (tiga) ruang kelas akhwat.
- Kelas IX terdiri dari 2 (dua) ruang kelas ikhwan dan 2 (dua) ruang akhwat.

b) Ruang belajar lainnya terdiri dari:

Selain ruang kelas di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang terdapat ruang belajar lain untuk menunjang pembelajaran siswa. Ruang tersebut yaitu:

Tabel 1. Jumlah Ruang Belajar Lainnya

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Kondisi*)	Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Kondisi
1) Perpustakaan	1	-	6) Lab. Bahasa	-	Baik
2) Lab. IPA	1	Baik	7) Lab. Komputer	1	Baik
3) Ketrampilan	-	-	8) PTD	-	-
4) Multimedia	1	Baik	9) Serbaguna/aula	1	Baik
5) Kesenian	-	-	10)	-	-

c) Ruang Kantor

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan sarana dan prasarana agar dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekolah telah menyediakan ruang khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha dan ruang tamu. Berikut ini merupakan jumlah ruangan yang tersedia untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMPIT Ihsanul Fikri

Magelang:

Tabel 2. Jumlah Ruang Kantor

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)
1) Kepala Sekolah	1	6 x 3	Baik
2) Wakil Kepala Sekolah	1	6 x 3	Baik
3) Guru	2	9 x9	Baik
4) Tata Usaha	1	6 x 6	Baik
5) Tamu	1	6 x 3	Baik

d) Ruang Penunjang

Berikut ini merupakan fasilitas ruang penunjang yang ada di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang:

Tabel 3. Jumlah Ruang Penunjang

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)
1) Gudang	1	5 x 5	10) Ibadah	4	19 x 16 (2) 8 x 9 (2)
2) Dapur	1	30 x 20	11) Ganti	-	-
3) Reproduksi	-	-	12) Koperasi	1	8 x 7
4) KM/WC Guru	2	2 x 1,5	13) Hall/lobi	-	-
5) KM/WC Siswa	48	2 x 1,5	14) Kantin	-	-
6) BK	1	2 x 4	15) Rumah Pompa/ Menara Air	5	9 k
7) UKS	1	8 x 7	16) Bangsal Kendaraan	1	9 x 4
8) PMR/Pramuka	-	-	17) Rumah Penjaga	6	9 x 7
9) OSIS	1	4 x 3	18) Pos Jaga	1	1.5 x 1

e) Lapangan Olahraga dan Upacara

Di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang terdapat beberapa lapangan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di luar kelas, yaitu terdiri dari lapangan olahraga, lapangan upacara, dan gedung olahraga. Berikut ini merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan olahraga di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang:

Tabel 4. Jumlah Lapangan Olahraga dan Upacara

Lapangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi
1) Lapangan Olahraga			
a) Basket	1	33 x 15	Baik
b) Bola Voly	1	18 x 9	Baik
c) Badminton	1	18 x 9	Baik
d) Futsal	1	33 x 15	Baik
e) Tenis Meja	1	4 x 4	Baik
2) Lapangan Upacara	1	33 X 15	Baik
3) Gedung Olahraga	1	30 x 40	Baik

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yang terdiri dari berbagai fasilitas sebagai berikut:

a) Media Pembelajaran

SMPIT Ihsanul Fikri Magelang memiliki media yang cukup memadai yaitu white board disetiap ruang kelas dan ada beberapa kelas yang sudah dipasang LCD.

b) Laboratorium

SMPIT Ihsanul Fikri Magelang memiliki beberapa laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran diantaranya laboratorium IPA, laboratorium computer, dan laboratorium multimedia.

c) Lapangan

SMPIT Ihsanul Fikri Magelang memiliki fasilitas lapangan olahraga yang cukup baik. Lapangan tersebut berupa lapangan basket, lapangan volly. Lapangan badminton, lapangan tenis meja, lapangan futsal, dan gedung olahraga.

d) Perpustakaan

Kondisi perpustakaan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang sudah cukup baik. Koleksi buku-buku cukup lengkap.

4) Ketenagaan

a) Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu sekolah. Berikut ini merupakan daftar jabatan kepala sekolah di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang beserta kualifikasi pendidikan terakhir.

Tabel 5. Daftar Kepala Sekolah

No	Jabatan	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Pend. Akhir
			L	P		
1.	Kepala Sekolah	Drs. Moh Mohtar	L	-	57 Th	S2 Magister Pendidikan
2.	Wakil Kepala Sekolah Ur. Kurikulum	Sholeh Abdurrohman, S.Kom	L	-	34 Th	S1 Ilmu Komputer
3G u	Wakil Kepala Sekolah Ur. Sarana Prasarana	Suparman, S.Pd	L	-	42 Th	S1 Pendidikan Bhs. Inggris
4r u	Wakil Kepala Sekolah Ur. Humas	Titi Fibrilianthi C., S.Pt	L	-	32 Th	S1 Peternakan
5. i	Wakil Kepala Sekolah Ur. Kesiswaan	Pamela Maher Wijaya, S.Sos I M.S.I	L	-	31 Th	S2 Politik Islam

b) Guru

SMPIT Ihsanul Fikri Magelang terdapat 47 (empat puluh tujuh) tenaga pengajar untuk semua mata pelajaran yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) guru tetap atau yang sudah berstatus PNS dan 11 (sebelas) guru tidak tetap atau guru bantu. Berikut ini merupakan daftar tenaga pengajar di SMPIT Ihsanul Fikri.

Tabel 6. Daftar Jumlah Guru

No	Tingkat pendidikan	Jumlah dan status guru				Jumlah	
		GT* /PNS		GTT**			
		L	P	L	P		
1	S3/S2	5		1		6	
2	S1	9	16	6	2	33	
3	D4						
4	D3/Sarjana muda	1	1			2	
5	D2			1	1	2	
6	D1		1			1	
7	≤ SMA sederajat	2	1			3	
Jumlah		17	19	8	3	47	

c) Tenaga Kependidikan

Dalam lembaga pendidikan, selain terdapat tenaga pendidik, juga terdapat tenaga kependidikan untuk melakukan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis lainnya, agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Adapun daftar tenaga kependidikan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Tenaga Kependidikan

No.	Tenaga pendukung	Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya						Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin				Jumlah	
		≤ SM P	SM A	D1	D2	D3	S1	PNS		Honorer			
								L	P	L	P		
1.	Tata Usaha	-	3	-	-	1	2	-	-	1	5	6	
2.	Perpustakaan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
3.	Laboran lab. IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Teknisi lab. Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Laboran lab. Bahasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	PTD (Pend Tek. Dasar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Kantin/Koperasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
8.	Penjaga Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Tukang Kebun	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
10.	Keamanan	1	3	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
11.	Lainnya: Paramedis	-	1	-	-	2	2	-	-	3	2	5	

d) Siswa

Berikut ini merupakan daftar siswa SMPIT Ihsanul Fikri Magelang 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 8. Daftar Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2009/2010 sampai S

e k a r Tha Pelajaran g	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls. VII + VIII + IX)	
	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Siswa	Rombel
	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel		
2009/2010	136 Org	4 Rbl	102 Org	4 Rbl	96 Org	4 Rbl	334 Org	12 Rbl
2010/2011	132 Org	4 Rbl	128 Org	4 Rbl	95 Org	4 Rbl	355 Org	12 Rbl
2011/2012	128 Org	4 Rbl	124 Org	4 Rbl	123 Org	4 Rbl	375 Org	12 Rbl
2012/2013	208 Org	6 Rbl	112 Org	4 Rbl	121 Org	4 Rbl	441 Org	14 Rbl
2013/2014	214 Org	6 Rbl	200 Org	6 Rbl	106 Org	4 Rbl	520 Org	16 Rbl

b. Deskripsi Informan Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi informan dalam penelitian skripsi ini yaitu

1) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pihak yang berkaitan langsung dalam pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yang terdiri dari 2 (dua) guru, yaitu :

a) Pak Sulkhan

Pak Sulkhan adalah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memegang semua kelas VII di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo dengan jurusan Administrasi Negara pada tahun 2006 dan sekarang merupakan salah satu guru di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan.

b) Pak Akhyar

Pak Akhyar adalah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memegang kelas VIII dan IX di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang. Beliau merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan *background* pendidikan yang berbeda, sebenarnya beliau merupakan lulusan dari Pendidikan Ekonomi yang ditugasi sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo angkatan 1999 dan mengajar di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang sejak tahun 2002 sampai sekarang.

2) Siswa SMPIT Ihsanul Fikri Magelang

Merupakan siswa yang diampu oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang bersangkutan.

Tabel 9. Daftar Informan Siswa

No.	Nama Siswa	Kelas
1.	Asma Hanifah	VII Akhwat 2
2.	Annisa Hasna Dia U	VII Akhwat 2
3.	Nabila Anis Saputri	VII Akhwat 2
4.	Adyaksa Bagas	VII Ikhwan 2
5.	Miftachul Huda Adi P	VII Ikhwan 2
6.	Mohammad Faza Al Falah	VII Ikhwan 2
7.	Mohammad Hanif Al Hasan	VII Ikhwan 2
8.	Ismail A	VII Akhwat 3
9.	Nabila Hasna Adawiyah	VII Akhwat 3
10.	Rahmadina Griyanti Lestari	VII Akhwat 3
11.	Nadia Hasna Khairunnisa	VII Akhwat 3
12.	Inas Ahmad Athaya	VIII Ikhwan 2
13.	Abdurrahman Jaisy Muhammad	VIII Ikhwan 2
14.	Bayu Kelana	VIII Ikhwan 2
15.	Amanda Dutta Sahari	VIII Akhwat 1
16.	Aqilah Abdillah Haqqi	VIII Akhwat 1
17.	Aulia Arifa	VIII Akhwat 1
18.	Nirina Nusrina	VIII Akhwat 1
19.	Tasya Aufa Amalia Hasan	VIII Akhwat 2
20.	Lutvi Aniek Setiyo Putri	VIII Akhwat 2
21.	Rofiaregina Zakah Winasis	VIII Akhwat 2
22.	Rahmi Nur Fadlilah	VIII Akhwat 2

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini disajikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral, metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral, dan teknik penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral.

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berdimensi Pendidikan Moral

Pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Apakah ada penyusunan khusus mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi lainnya? Menurut Pak Sulkhan ada perbedaan mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tetapi sedikit karena pembelajaran moral itu bersifat luas dan aplikatif sehingga tidak memungkinkan kita untuk mendeskripsikannya dalam selembar kertas (Wawancara 8 April 2014).

Berdasarkan wawancara 8 April 2014 dengan Pak Sulkhan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas bahwa pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak selalu sama, sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Karena yang dihadapi berupa manusia, manusia itu fleksibel. Metode pembelajaran yang tepat sasaran dan menarik bagi anak setiap tahunnya berbeda. Sehingga penerapan metode pembelajaran melihat dahulu kondisi, karakter dan efektifitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan sebagai pedoman pembelajaran saja, pelaksanaanya saya lebih bersifat fleksibel.

Menurut Pak Akhyar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) cenderung dipakai sebagai formalitas saja. Jika untuk pendidikan moral seperti sikap positif yang ada dalam kompetensi dasar lebih ke *action* penerapannya langsung, misalnya saja saya membuat kontrak pembelajaran pada awal pertemuan. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak selalu sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahkan seringnya melenceng dengan Rencana Pelaksanaan yang disusun. Jika dalam aspek moral saya lebih suka *action* dan secara verbal (Wawancara 15 April 2014).

Berdasarkan dokumentasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas VII dan VIII, bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berdimensi pendidikan moral terintegrasi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan pada

umumnya. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral terlihat pada format perencanaan pembelajaran yaitu pada butir kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran yang direncanakan.

Dalam butir kompetensi dasar untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral berisi mengenai kemampuan yang harus dikuasai peserta didik yang berupa penanaman nilai dan/atau pembentukan sikap yang harus dimiliki peserta didik. Tujuan pembelajaran berisi tentang hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik mengenai nilai-nilai dan sikap moral yang sesuai dengan kompetensi dasar.

Standar Kompetensi	:	5. Memahami kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia.
Kompetensi Dasar	:	5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.
Alokasi Waktu	:	4 x 40 menit (2 x pertemuan)
A. Tujuan Pembelajaran		
Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat:		
1. menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat;		
2. menunjukkan sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia		
❖ Karakter siswa yang diharapkan :		
Dapat dipercaya (Trustworthiness) Jujur (honest) Kewarganegaraan (citizenship)		
B. Materi Pokok		
1. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat 2. Sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia		
C. Metode		
1. Analisis kritis 2. Diskusi		
D. Langkah-Langkah Pembelajaran		

Gambar 1. Format Metode Pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditunjukan pada format penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan merencanakan metode pembelajaran yang bervariatif disesuaikan dengan materi dan tujuan yang akan dicapai. Penerapan metode pembelajaran dalam format perencanaan pembelajaran disusun bervariatif dan tidak menggunakan metode pembelajaran yang konvensional.

E. Penilaian			
Penilaian dilaksanakan selama proses dan seusai pembelajaran			
Indikator pencapaian	Teknik penilaian	Bentuk Instrumen	Instrumen
Memahami konteks nilai dan penilaian demokrasi dalam kehidupan keluarga, sekolah, bangsa dan negara	Penilaian diri	Emosional	Format penilaian skala sikat Instrumen terlampir
	Penilaian diri	Emosional	Format penilaian pengamatan pendek demokrasi instrumen terlampir

Mengalihui,
Kepala SMPIT Ihsanul Fikri

Mungkid,
Guru Mapel

Juli 2013

Meh Mehtar, M.Pd

Mu'ayyan Akhyar, S.Pd

Gambar 2. Format Teknik Penilaian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berdimensi pendidikan moral juga terlihat dalam format teknik penilaian yang direncanakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mengevaluasi hasil pembelajaran pendidikan moral. Teknik penilaian yang diterapkan merupakan teknik penilaian untuk menilai

sikap, bukan untuk menilai kemampuan kognitif saja. Teknik penilaian tersebut antara lain penilaian diri dan penilaian sikap.

Pada beberapa observasi yang pernah dilakukan, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di dalam kelas memang tidak selalu sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada observasi hari Sabtu, 12 April 2014 di kelas VII Akhwat dan VII Ikhwan metode pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan diterapkan adalah ceramah tetapi dalam pelaksanaannya menerapkan metode resitasi. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan karakter dan kepribadian siswa setiap tahunnya dan manusia adalah makhluk yang fleksibel sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi siswa.

b. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berdimensi Pendidikan Moral

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tidak semua guru Pendidikan Kewarganegaraan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran dan metode pembelajaran tersebut tidak selalu sesuai dengan metode pembelajaran yang terdapat dalam format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Metode pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas merupakan metode pembelajaran yang

aplikatif tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang terdapat dalam format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Wawancara tanggal 15 April 2014 dengan Pak Akhyar mengenai penerapan metode pembelajaran di kelas bahwa pembelajaran di kelas belum menggunakan metode khusus untuk pembelajaran seperti sikap dan moral. Hal itu karena berbagai faktor yaitu guru lebih terfokus pada banyak materi yang harus diselesaikan dan juga masalah waktu. Banyak materi Pendidikan Kewarganegaraan yang dirasa terlalu berat untuk pelajar SMP, sehingga siswa kesulitan untuk menerima materi pelajaran. Karena beberapa faktor tersebut, guru tidak sempat untuk memilih metode yang tepat.

Pada wawancara tanggal 8 April dan 12 April 2014 dengan Pak Sulkhan mengenai penerapan metode pembelajaran bahwa penerapan metode pembelajaran yang tepat sasaran dan menarik bagi anak setiap tahunnya berbeda. Sehingga penerapan metode pembelajaran melihat dahulu kondisi, karakter dan efektifitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang ada di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak selalu diterapkan dalam pembelajaran di kelas, karena berbagai faktor tersebut. Penerapan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral yang bertujuan lebih kepada sikap siswa, maka pembelajaran lebih ditekankan pada praktek. Misal dengan metode resitasi (penugasan) dan metode debat. Metode resitasi (penugasan) tersebut untuk mencari

contoh-contoh konkret, mencari berita, membuat kliping agar anak lebih mudah memahami materi dan nilai-nilai yang ada.

Mencari contoh-contoh konkret misalnya dalam menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap siswa diberi tugas untuk mencari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda satu sama lain. Pada Standar Kompetensi menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dengan mencari contoh-contoh macam-macam Hak Asasi Manusia. Penugasan ini untuk melatih siswa agar memahami materi yang disampaikan guru dan menerapkannya dengan mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Mencari berita misalnya siswa diberi tugas untuk mencari contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di lingkungan rumah, sekolah dan tempat tinggal masing-masing. Membuat kliping misalnya pada materi Hak Asasi Manusia, siswa diberi tugas untuk membuat kliping mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dan menganalisis termasuk jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia mana.

Seperti hasil observasi tanggal 7 April 2014 di kelas VIII Akhwat dan 12 April 2014 di kelas VII yang didukung dengan hasil wawancara dengan Ismail A siswa kelas VII Ikhwan mengenai metode pembelajaran yang diterapkan guru di dalam kelas bahwa metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis pendidikan moral yang diterapkan

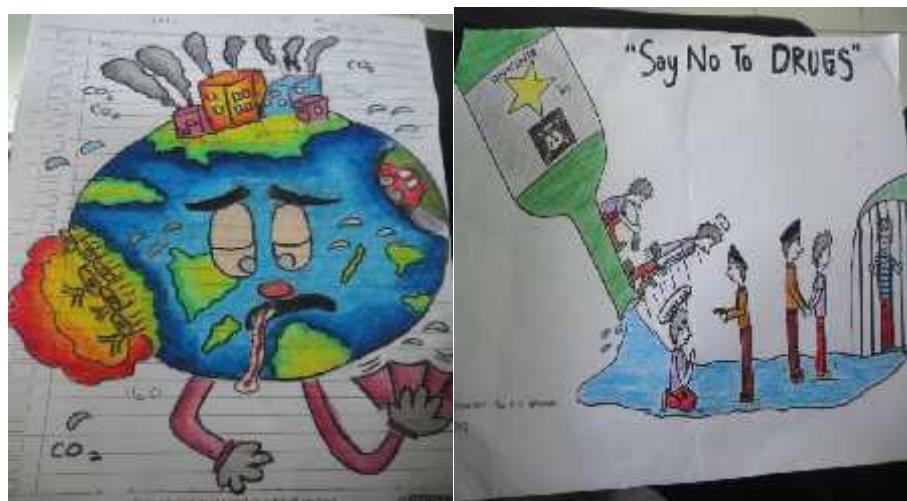
guru yaitu ceramah bervariasi, diskusi, dan resitasi (penugasan). Biasanya metode ceramah bervariasi ini dengan tanya jawab dan juga dengan cerita. Dalam ceramah guru sering menambahkan dalil-dalil Al-Qur'an dan al-Hadist. Siswa lebih mudah memahami jika guru menjelaskan materi yang berdimensi pendidikan moral dengan menggunakan cerita. Seperti yang diungkapkan oleh Ismail A dan Annisa Hasna Dia kelas VII Ikhwan bahwa menjelaskan dengan cerita lebih menyenangkan dan apa lagi jika diperkuat dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan al-hadist, hal tersebut lebih tersampaikan ke dalam diri siswa.



Gambar 3. Proses Pembelajaran dengan Metode Ceramah Bervariasi

Pada observasi tanggal 12 April 2014 di kelas VII Akhwat 2 dan VII Ikhwan 2 metode pembelajaran yang diterapkan guru adalah resitasi (penugasan). Guru memberi penjelasan singkat dengan menerapkan metode ceramah, kemudian siswa diberi tugas untuk mengemukakan pendapat secara tertulis dalam sebuah gambar yang berisi tentang himbauan ataupun kritik sosial. Sebelumnya guru menjelaskan dengan memberikan contoh dari tugas tersebut.

Pada wawancara 12 April 2014 dengan Adyaksa Bagas siswa kelas VII Ikhwan, mengenai penerapan metode resitasi (penugasan) tersebut dapat menambah kreativitas siswa. Siswa diharuskan berfikir secara kreatif untuk mengungkapkan konsep pikirannya dalam sebuah gambar. Selain itu, tugas tersebut sebagai pembelajaran yang mandiri, karena siswa harus memahami tentang konsep mereka dan setelah itu disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi materi pelajaran tidak harus dari guru tetapi bisa dari siswa yang lain.



Gambar 4. Contoh Hasil Penugasan Siswa tentang Mengemukakan Pendapat Lewat Tulisan

Pada Gambar 4. tentang contoh hasil penugasan siswa tentang mengemukakan pendapat lewat tulisan yang berisi tentang himbauan mapun kritik sosial. Gambar pertama bahwa bumi kita sudah mengalami kerusakan akibat banyaknya asap pabrik, kendaraan bermotor, dan kebakaran hutan yang banyak menghasilkan gas karbondioksida. Dari gambar tersebut memiliki makna bahwa masyarakat harus menjaga bumi kita dan mengurangi polusi. Pada gambar kedua menggambarkan tentang

akibat meminum minuman keras. Akibat meminum minuman keras dapat merugikan diri sendiri dan merupakan pelanggaran baik melanggar norma agama dan norma hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan hasil observasi di kelas VII Akhwat 2, VII Akhwat 3, dan VII Ikhwan 2 metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru yaitu metode debat. Metode debat ini diterapkan untuk mempraktikan mengaktualisasi kebebasan berpendapat dengan cara lisan. Sebelum guru menerapkan metode ini, guru melakukan kegiatan apersepsi yaitu dengan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang pernah disampaikan agar siswa kembali kondusif dalam pembelajaran.

Dalam kegiatan awal pembelajaran guru menjelaskan sedikit materi mengenai macam-macam cara mengeluarkan pendapat di muka umu dengan ceramah. Guru ceramah mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian guru membagi siswa menjadi 2 (dua) kelompok dan membagi tema debat. Guru memberikan motivasi dan aturan main dalam debat. Di akhir pembelajaran guru melakukan evaluasi mengenai kegiatan debat yang dilakukan dan memberikan *feedback* mengenai kegiatan tersebut. Guru menjelaskan nilai-nilai mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Ada beberapa hambaatan yang ditemui dalam penerapan metode debat yaitu dalam debat hanya siswa tertentu saja yang aktif dalam

kegiatan pembelajaran tersebut, siswa belum bisa menempatkan posisi dirinya dalam debat apabila sebenarnya siswa tersebut setuju atau tidak setuju mengenai tema debat tersebut, masih banyak siswa yang belum bisa mengontrol diri dan menjaga emosi, dan siswa tidak dapat fokus pada tema debat karena kebanyakan siswa terpancing dengan jawaban lawan.

c. Teknik Penilaian Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berdimensi Pendidikan Moral

Penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan berdimensi lainnya memiliki teknik penilaian yang berbeda dalam penerapannya. Berdasarkan wawancara tanggal 15 April 2014 dengan Pak Akhyar mengenai penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral bahwa penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral berbeda dengan penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi lain. Teknik penilaian yang digunakan untuk hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral masih sederhana yaitu penilaian sikap dengan menggunakan observasi, jika penilaian kognitif sudah jelas menggunakan tes seperti ulangan harian. Jika tidak ada siswa yang terlalu mencolok sikap negatifnya, tidak akan mendapat nilai yang jelek.

Hal tersebut juga didukung hasil wawancara tanggal 8 April 2014 dengan Pak Sulkhan, bahwa dalam penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral terdapat teknik penilaian khusus yang berbeda dengan teknik penilaian Pendidikan Kewarganegaraan pada materi yang bersifat hafalan. Penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral merupakan ilmu yang bersifat aplikatif dan secara langsung seharusnya bisa membentuk karakter dan perilaku siswa, sehingga secara hasil pembelajaran bisa dilakukan dengan menggunakan observasi yaitu dilihat dari perilaku anak dalam keseharian. Berbeda dengan dimensi Pendidikan Kewarganegaraan lain mungkin yang bersifat pengetahuan umum yaitu menggunakan teknik tes saja.

Di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang untuk teknik penilaian observasi langsung ini, bukan merupakan hal yang sulit karena pendidikan di SMPIT Ihsanul Fikri adalah sekolah berasrama dan pembentukan karakter siswa adalah pondasi pokok dalam keberhasilan proses tujuan lembaga pendidikan. Setiap guru dan pengurus asrama ikut serta mengawasi dan bertanggung jawab terhadap tahap-tahap pembentukan moral anak, sehingga setiap tingkah laku anak selalu dipantau dan ada catatan *recordnya*. Selain dengan observasi perilaku, ada beberapa teknik penilaian lain yaitu pertanyaan langsung kepada anak, menggunakan buku catatan khusus anak (buku *record* kejadian-kejadian anak).

Teknik ini dilakukan untuk menilai sikap siswa terhadap materi pembelajaran dan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik pertanyaan langsung dapat diterapkan dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan siswa mengenai sikap yang seharusnya terhadap sesuatu hal atau masalah yang terjadi. Teknik evaluasi ini dapat disimpulkan melalui reaksi atas jawaban yang diberikan siswa.

Buku catatan khusus anak atau catatan perkembangan (*anecdotal record*) dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu *pertama*, siswa yang dikatagorikan sebagai siswa yang berprestasi, *kedua*, siswa yang dikatagorikan sebagai siswa yang baik, dan *ketiga*, siswa yang dikatagorikan siswa yang memiliki sikap yang buruk/bermasalah. Adanya pembagian tingkatan ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam mengawasi dan memberikan penilaian terhadap siswa.

Berdasarkan data dokumentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas VII dan VIII terdapat teknik penilaian yang berbeda dengan teknik penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat hafalan. Teknik penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral tidak menggunakan teknis tes tetapi teknik non-tes, yaitu dengan observasi dan penilaian diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, penilaian terhadap sikap merupakan suatu hal yang sulit dilakukan karena yang dinilai bukan satu atau dua siswa tetapi banyak siswa. Tidak hafalnya nama

setiap siswa menjadi hambatan untuk menilai sikap mereka, sehingga guru sering menganalogikan jika siswa tidak terlalu bermasalah maka siswa tersebut tetap mendapat nilai yang baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut ini disajikan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral, metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral, dan teknik penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral.

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berdimensi Pendidikan Moral

Dalam pengimplementasian pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik agar sesuai dengan materi dan tujuan yang yang hendak dicapai. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai representasi dari pendidikan moral menjadi hal yang penting bagi siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan Pak Sulkhan bahwa tujuan jangka panjang dalam pembelajaran adalah untuk mempersiapkan pemimpin untuk negeri ini.

Tujuan jangka panjang ini akan berhasil apabila dasar atau pondasi calon pemimpin negeri adalah moralitas yang sangat kokoh. Apabila peserta didik pintar secara akademisnya tetapi miskin moralitas, maka akan terjadi kekacauan seperti sekarang.

Pendidikan moral bagi siswa sangatlah penting, oleh karena itu, perlu adanya perencanaan khusus dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral. Perencanaan pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral.

Pendidikan moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pengembangan dari komponen *civic skills* dan *civic disposition* yang bertujuan pada penanaman nilai-nilai moral dan pembentukan sikap siswa. Pada materi Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP/MTS terkandung dalam kompetensi dasar sebagai berikut:

Tabel 10. Dimensi Ketrampilan Kewarganegaraan Tingkat SMP/MTS

Kelas	Semester	Dimensi Ketrampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)
VII	1	Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	2	Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
VIII	1	Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Menampilkan ketiaatan terhadap perundang-undangan nasional
	2	-
IX	1	Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara
	2	Menampilkan prestasi diri sesuai dengan kemampuan demi keunggulan bangsa Menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa

Sumber : Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara, hal 165

Tabel 11. Dimensi Sikap dan Nilai Kewarganegaraan Tingkat SMP/MTS

Kelas	Semester	Dimensi sikap dan nilai Kewarganegaraan (Civic Disposition)
VII	1	Memiliki sikap positif terhadap norma yang berlaku Memiliki sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama Indonesia
	2	Memiliki sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM Bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat
VIII	1	Memiliki sikap positif terhadap Pancasila Memiliki sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen Taat terhadap perundangan nasional
	2	Memiliki sikap-sikap positif terhadap demokrasi Memiliki sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia
IX	1	Memiliki sikap bela negara
	2	Memiliki sikap terhadap globalisasi

Sumber : Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara, hal 193

Berdasarkan dimensi keterampilan kewarganegaraan dan dimensi penanaman nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral memiliki kompetensi pencapaian yang berbeda dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan lainnya. Pencapaian tersebut bukan merupakan pencapaian kognitif saja tetapi juga pada pencapaian afektif dan psikomotorik yang merupakan penanaman nilai-nilai dan pembentukan sikap. Dalam proses implementasi tersebut diperlukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara khusus agar pembelajaran menjadi efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang terkait implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri diketahui bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral diintegrasikan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya, tetapi terdapat perbedaan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi lain. Hal tersebut dikarenakan bahwa pembelajaran moral bersifat luas dan aplikatif sehingga tidak memungkinkan untuk mendiskripsikan dalam selembar kertas.

Perbedaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral terlihat dalam format perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMPIT Ihsanul Fikri, yaitu butir kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian yang direncanakan. Pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM, kegiatan pembelajaran dengan pengamatan yang dilakukan oleh siswa yang kemudian siswa dituntut untuk membuat laporan tentang upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat tempat tinggal. Pada kolom penilaian dalam RPP, tidak hanya menggunakan teknik tes tetapi juga non-tes seperti kuisioner dan unjuk kerja.

Pada kompetensi dasar menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, metode pembelajaran yang diterapkan adalah resitasi (penugasan). Metode resitasi (penugasan) yang diterapkan guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang memiliki model yang berbeda-beda. Seperti hasil wawancara dengan Pak Sulkhan, bahwa penugasan tersebut misalnya mencari contoh-contoh konkret dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa diajak langsung untuk menganalisis dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Mencari berita dalam surat kabar dan membuat kliping tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia. Melalui penugasan tersebut siswa diajak untuk melihat secara nyata tentang contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga diharapkan siswa dapat menghargai penegakan Hak Asasi Manusia, dan juga ikut turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan SMPIT Ihsanul Fikri Magelang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Setiap guru SMPIT Ihsanul Fikri Magelang diwajibkan untuk memasukan nilai-nilai moral dalam setiap pelajaran, sehingga moralitas anak yang kuat menjadi keunggulan SMPIT Ihsanul Fikri sejak dahulu. Terlihat dalam RPP Pendidikan Kewarganegaraan guru menyisipkan nilai-nilai keagamaan dalam materi dan kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul

Fikri Magelang. Hal tersebut menjadi perbedaan tersendiri dengan sekolah lainnya.

Pada kenyataannya tidak semua guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berdimensi pendidikan moral secara khusus berbeda dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi lainnya. Misalnya Pak Akhyar menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hanya sebagai formalitas seorang guru yang harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Berdasarkan Lampiran Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa salah satu prinsip dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu:

Memperhatikan perbedaan individu peserta didik RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

Jika dikaitkan dengan prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri belum secara optimal memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam Lampiran Permendiknas No. 41 Tahun 2007.

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum secara optimal memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), sulitnya untuk memperhatikan perbedaan peserta didik menjadi faktor penyebab utama dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Bukan hanya satu atau dua siswa yang menjadi patokan untuk disesuaikan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tetapi berpuluhan bahkan ratusan siswa yang setiap kelasnya mempunyai karakter yang berbeda.

Dalam pelaksanaan pembelajaran Guru Pendidikan Kewarganegaraan tidak selalu sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Hal tersebut mengingat beberapa faktor, antara lain mengenai karakter siswa yang berbeda-beda setiap tahunnya, sehingga guru merasa kesulitan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang. Perbedaan kepribadian antar siswa mempersulit guru untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kepribadian dan cara belajar siswa. Banyaknya materi dan keterbatasan waktu mempersulit guru untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Oleh karena itu, tidak semua pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah direncanakan.

Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dalam domain desain pembelajaran yang akan memberikan dampak terhadap keefektifan belajar (Budiningsih, 2008: 17). Karakteristik siswa yang berbeda-beda dalam setiap kelas menjadikan guru kesulitan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai sehingga pembelajaran dapat

berjalan efektif. Perbedaan karakteristik siswa setiap tahunnya juga tidak dapat menjadi acuan untuk keberhasilan pembelajaran untuk tahun berikutnya. Pemahaman guru terhadap karakteristik siswa sangat diperlukan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai agar pembelajaran dapat berjalan efektif.

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang terintegrasikan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya. Implementasinya terlihat dalam butir kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian dalam format perencanaan pembelajaran.

Dalam butir kompetensi dasar untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral berisi mengenai kemampuan yang harus dikuasai peserta didik yang berupa penanaman nilai dan/atau pembentukan sikap yang harus dimiliki peserta didik. Tujuan pembelajaran berisi tentang hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik mengenai nilai-nilai dan sikap moral yang sesuai dengan kompetensi dasar.

Metode pembelajaran yang direncanakan tidak hanya menerapkan metode konvensional tetapi ada pembelajaran aktif. Materi pembelajaran disisipi dengan nilai-nilai keagamaan yang disesuaikan dengan materi. Penilaian yang direncanakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak dengan menggunakan teknik tes seperti materi lainnya tetapi teknik non-tes seperti penilaian diri dengan kuisioner dan unjuk kerja.

Secara umum penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri belum optimal memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Masih ada beberapa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang tidak mencantumkan indikator pencapaian kompetensi yaitu mengenai perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian dari kompetensi dasar.

2. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berdimensi Pendidikan Moral

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral lalu diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi sebagian besar guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun termasuk guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang. Berbagai macam alasan mengenai hal tersebut, seperti karena keterbatasan waktu dan banyak materi yang harus disampaikan, ketika berada dalam kelas, kondisi kelas tidak sesuai rencana, karena yang dihadapi guru dalam kelas adalah manusia, dan manusia bersifat fleksibel dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sehingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran digunakan

sebagai pedoman, dan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas lebih bersifat fleksibel.

Pengimplementasian pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses pembelajaran di kelas dapat ditunjukkan dalam penerapan metode pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral yang bertujuan lebih kepada sikap siswa, maka pembelajaran lebih ditekankan pada praktek misalnya dengan melihat fenomena yang ada sehingga siswa dapat mengambil sikap dan menerapkan materi yang pernah didapat.

Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang, tidak semua guru Pendidikan Kewarganegaraan menerapkan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral. Hal tersebut dikarenakan karena beberapa faktor, baik faktor dari guru tersendiri maupun dari siswa. Salah satu hasil wawancara dengan Pak Akhyar selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral adalah dari guru tersendiri.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pak Sulkhan selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa hambatan dalam penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral adalah pada kondisi dan karakter siswa yang berbeda-beda. Guru harus memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa agar pembelajaran dapat berjalan efektif.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral adalah dari siswa dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Apabila dilihat dari kondisi dan lingkungan yang ada, maka hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan karena kondisi dan lingkungan di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang sudah dirancang agar pembelajaran disana berjalan efektif termasuk dalam pembelajaran pendidikan moral.

Penerapan metode pembelajaran yang sesuai memang sangat penting dalam proses pembelajaran disamping agar pembelajaran yang dirancang guru tidak monoton sehingga dapat meningkatkan antusias dan motivasi belajar siswa tetapi juga agar tersampaikannya tujuan pembelajaran dan pembelajaran dapat berjalan efektif. Metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yaitu:

a. Ceramah bervariasi

Metode ceramah merupakan metode yang hampir selalu diterapkan dalam pembelajaran. Agar penyampaian materi dengan ceramah tidak membosankan metode ceramah dibuat lebih bervariasi dengan tanya

jawab dan atau dengan cerita. Metode ceramah bervariasi dengan tanya jawab kepada siswa agar pembelajaran tidak hanya dari satu arah yaitu guru tetapi juga dari siswa, diselingi juga cerita mengenai kehidupan sehari-hari atau berita yang faktual yang sedang terjadi, dan presentasi menggunakan *power point* agar siswa tidak jemu.

Metode ceramah bervariasi dengan tanya jawab telah melatih siswa menjadi kritis dan guru dapat menilai kemampuan dan sikap siswa mengenai pemecahan masalah dengan tanya jawab. Ceramah dengan cerita menjadi metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang. Siswa berpendapat bahwa pembelajaran dengan cerita menjadi lebih menarik karena tidak terpaku pada materi dan penyampaian dengan cerita menjadi lebih mudah diterima bagi siswa. Khususnya, di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yang berbasis Islam dalam pembelajaran sering disisipi dengan nilai-nilai keagamaan, al-hadist, dan Al-Qur'an, sehingga lebih mengena bagi mereka. Tidak jarang pula guru memberikan motivasi-motivasi kepada siswa.

Pembelajaran dengan metode ceramah bervariasi dengan cerita dan bukan hanya terpaku terhadap materi yang diajarkan mempunyai kelebihan tersendiri bagi siswa. Siswa lebih mudah menerima pelajaran dengan cerita yang di dalamnya penuh dengan motivasi-motivasi dan contoh fenomenal yang sedang terjadi sehingga siswa dapat mengetahui contoh penerapan dari materi yang didapat. Secara umum metode

pembelajaran ini sebagai implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah cukup efektif untuk diterapkan kepada siswa.

b. Diskusi

Diskusi merupakan metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam kelas melatih kerja sama siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berasal dari pendapat siswa kemudian diperkuat dengan pendapat guru. Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang guru menerapkan metode diskusi ini yang sebelumnya guru memberikan beberapa informasi tentang materi pelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa memahami kegiatan yang akan mereka kerjakan dalam proses pembelajaran.

Pada umumnya dalam menerapkan metode ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian diberikan tema yang sama ataupun tema yang berbeda untuk diselesaikan secara berkelompok. Siswa diberikan kebebasan untuk mencari informasi dari manapun semisal buku pelajaran untuk mencari data atau informasi terkait permasalahan yang akan didiskusikan. Metode diskusi dapat menjadikan siswa lebih berfikir kritis, mendorong siswa untuk berani mengekspresikan pendapat, dan agar siswa saling menghargai pendapat orang lain.

Metode diskusi merupakan metode yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan moral. Metode ini merupakan

perkembangan pendekatan moral kognitif yang didasarkan pada dilema moral. Proses diskusi mulai disajikan dengan cerita yang mengandung dilema. Dalam diskusi, siswa didorong untuk menentukan posisi apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang terlibat, apa alasan-alasannya. Siswa diminta mendiskusikannya tentang alasan-alasan tersebut dengan teman-teman satu kelompok (Winarno, 2013: 202).

Penggunaan metode diskusi akan dapat menghidupkan suasana kelas. Dalam pendekatan moral kognitif guru memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan yang sesuai pada tingkat perkembangan *moral reasoning* masing-masing, dalam pengajaran Pendidikan Nilai siswa diarahkan sampai pada kesimpulan akhir yang sama, sesuai dengan nilai-nilai sosial tertentu, yang bersumber dari Pancasila dan budaya luhur bangsa Indonesia ataupun nilai local suatu daerah (Winarno, 2013: 214).

Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang, proses diskusi diserahkan pada masing-masing kelompok dan guru hanya mengawasi jalannya diskusi. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat mengembangkan pemikirannya sendiri dan diharapkan dapat membuat kesimpulan hasil diskusi. Setelah proses diskusi selesai guru memilih kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keaktifan siswa dan dapat mengetahui sikap siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan *feedback* kepada siswa dan ada beberapa

siswa yang melakukan tanya jawab untuk mengkonfirmasi hasil diskusi. Di akhir proses jalannya diskusi guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi untuk menyamakan persepsi, sehingga siswa akan lebih paham mengenai permasalahan yang sedang dibahas.

Secara umum metode diskusi sebagai salah satu metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral sudah cukup baik, karena melalui diskusi guru dapat mengetahui pemahaman siswa dan sikap moral siswa yang terbentuk dalam proses pembelajaran. Walaupun, masih terdapat beberapa hambatan diantaranya tidak semua siswa aktif dalam proses diskusi, metode diskusi ini baik untuk pembelajaran pendidikan moral.

c. Metode Resitasi (Penugasan)

Metode resitasi (penugasan) merupakan metode belajar mengajar dimana guru memberikan tugas kepada siswa sebagai kegiatan belajar dan kemudian ada pertanggungjawaban dari siswa atas kegiatan belajar yang dilakukan. Metode ini diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang sesuai yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kompetensi dasar menerapkan norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siswa lebih diharapkan mengamati kondisi dan keadaan lingkungan sekitar tentang pelaksanaan norma, kemudian siswa dituntut untuk menerapkan norma-

norma tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Metode tersebut juga dapat menjadi refleksi bagi siswa.

Metode resitasi (penugasan) untuk mencari berita dalam surat kabar dan pembuatan kliping bertujuan agar siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada saat pembelajaran. Melalui penugasan tersebut siswa diajak untuk melihat secara nyata tentang contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga diharapkan siswa dapat menghargai penegakan Hak Asasi Manusia, dan juga ikut turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil pengamatan 12 April 2014 di kelas VII dalam proses pembelajaran pada kompetensi dasar 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, ada suatu penugasan yang diberikan oleh guru yang tidak biasa diberikan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu siswa diberikan tugas untuk mengemukakan pendapat secara tertulis yaitu dalam bentuk gambar yang sederhana yang penuh makna sesuai dengan pesan apa yang ingin siswa sampaikan kebanyak orang.

Penugasan tersebut biasa diberikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia atau kesenian yaitu pembuatan karikatur. Penugasan ini dapat melatih siswa agar lebih kreatif dan mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang bersangkutan serta dapat mengembangkan pemikiran siswa. Sehingga siswa dapat menyampaikan makna dari

gambar yang dibuat yang berupa nilai-nilai moral yang harus ditanamkan.

Metode resitasi ini dapat dimasukan dalam salah satu model pembelajaran afektif yaitu merupakan pengembangan model nondirektif. Dimana para siswa memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri. Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Guru berperan sebagai fasilitator dan hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa. Penggunaan model ini bertujuan untuk membantu siswa mengaktualisasikan dirinya (Sukmadinata, 2005: 194).

Melalui berbagai penugasan yang diberikan oleh guru, seperti mencari berita, membuat kliping, dan tugas untuk mengemukakan pendapat secara tulisan melalui sebuah gambar, merupakan cara siswa untuk belajar mengaktualisasikan kemampuan dan potensi siswa yang mereka miliki. Sehingga dalam pembelajaran tidak hanya untuk menghafal dan mengetahui tetapi juga memiliki sikap atau ketrampilan dalam menerapkan pengetahuan atau materi yang pernah mereka dapatkan.

Metode resitasi ini cukup baik untuk diterapkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral tanpa kendala yang berarti. Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral lebih kepada penanaman nilai dan sikap moral yang akan terbentuk

dibandingkan pengetahuan moral. Penugasan tersebut merupakan penerapan dari materi yang telah diperoleh siswa.

d. Metode debat

Metode debat adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berdiskusi antara 2 (pihak) atau lebih baik secara individu maupun kelompok untuk berbagi argument mengenai berbagai masalah yang terdiri dari kelompok pro dan kontra terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang, metode ini digunakan untuk menerapkan praktik mengenai mengaktualisasikan kebebasan berpendapat secara lisan. Metode ini dapat menumbuhkan sikap kritis siswa terhadap suatu permasalahan dan dapat menjadi penilaian sikap siswa dalam menghadapi suatu permasalahan.

Dalam penerapan metode ini guru menjelaskan materi mengenai macam-macam mengemukakan pendapat di muka umu dengan ceramah. Guru berceramah mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian guru membagi siswa menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pro dan kontra terhadap tema tersebut. Guru memberikan motivasi dan aturan main dalam debat.

Berdasarkan hasil penelitian di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang ada beberapa hambatan dalam penerapan metode debat yaitu dalam debat hanya siswa tertentu saja yang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, siswa belum bisa menempatkan posisi dirinya dalam debat apabila sebenarnya siswa tersebut setuju atau tidak setuju mengenai

tema debat tersebut, masih banyak siswa yang belum bisa mengontrol diri dan menjaga emosi, dan siswa tidak dapat fokus pada tema debat karena kebanyakan siswa terpancing dengan jawaban lawan.

Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan keaktifan siswa, menumbuhkan sikap kritis siswa dan menumbuhkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Melalui metode ini diharapkan siswa dapat menempatkan sikap yang baik ketika berbicara dan berpendapat di depan umum atau dalam masyarakat. Dalam penerapan metode ini guru harus memperhatikan mengenai masalah yang akan dibahas sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga melalui metode ini siswa dapat memperdalam pemahaman mengenai materi yang terkait. Selain itu, pada akhir kegiatan guru harus memberikan evaluasi mengenai kegiatan tersebut dan mengenai nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dan sikap-sikap yang harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

3. Teknik Penilaian Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berdimensi Pendidikan Moral

Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral merupakan pembelajaran yang bertujuan pada penanaman nilai-nilai moral dan pembentukan sikap siswa. Untuk mengukur pencapaian tersebut diperlukan teknik penilaian khusus yang berbeda dengan teknik evaluasi pada materi lainnya. Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi

pendidikan moral merupakan ilmu yang bersifat aplikatif yang seharusnya secara langsung dapat membentuk karakter dan perilaku siswa.

Penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan pada penilaian kepribadian. Berdasarkan Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, bahwa penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai luhur masyarakat adalah bagian dari kelompok mata pelajaran kewarganegaraan. Oleh karena itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan harus memperhatikan penilaian aspek kepribadian siswa, bukan hanya pengetahuan siswa saja.

Dalam penilaian berbasis kelas, terdapat 7 (tujuh) macam teknik penilaian yang dapat digunakan, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri (Puskur, 2006). Masing-masing teknik penilaian tersebut disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan dirancang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Berdasarkan 7 (tujuh) macam teknik penilaian tersebut, teknik penilaian sikap merupakan salah satu penilaian yang diterapkan dalam penilaian pendidikan moral yaitu untuk menilai sikap siswa. Dalam penilaian sikap yang menjadi objek penilaian dalam proses pembelajaran adalah sikap siswa terhadap materi pelajaran, sikap siswa terhadap guru/pengajar, sikap siswa terhadap proses pembelajaran, dan sikap siswa

berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran (Winarno, 2013: 222).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi SMPIT Ihsanul Fikri Magelang teknik penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral yaitu menggunakan teknik penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan untuk menilai sikap siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas dengan menggunakan teknik observasi perilaku, pertanyaan langsung dan catatan perkembangan (*anecdotal record*).

Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral merupakan ilmu yang bersifat aplikatif dan secara langsung seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai moral dan sikap siswa yang bermoral, sehingga untuk mengukur hasil pembelajaran dengan menggunakan teknik observasi perilaku. Teknik ini dilakukan untuk menilai sikap siswa terhadap materi pembelajaran dan terhadap proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Teknik pertanyaan langsung dapat diterapkan dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan siswa mengenai sikap yang seharusnya terhadap sesuatu hal atau masalah yang terjadi. Teknik penilaian ini dapat disimpulkan melalui reaksi atas jawaban yang diberikan siswa.

SMPIT Ihsanul Fikri Magelang yang merupakan sekolah berasrama mempunyai buku catatan khusus siswa yang berisi tentang catatan kejadian siswa baik selama proses pembelajaran berlangsung dan ketika berada di asrama. Catatan perkembangan (*anecdotal record*) ini dibagi menjadi

beberapa tingkatan yaitu *pertama*, siswa yang dikategorikan sebagai siswa yang berprestasi, *kedua*, siswa yang dikategorikan sebagai siswa yang baik, dan *ketiga*, siswa yang dikategorikan siswa yang memiliki sikap yang buruk/bermasalah. Adanya pembagian tingkatan ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam mengawasi dan memberikan penilaian terhadap siswa.

Secara umum teknik penilaian yang diterapkan dalam penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang sudah cukup baik. Penilaian hasil pembelajaran disana tidak hanya ditekankan pada aspek kognitifnya tetapi juga pada aspek afektifnya. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan teknik non-tes yaitu penilaian sikap yang meliputi teknik observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan catatan perkembangan. Ketiga teknik tersebut digabungkan untuk memberikan penilaian sikap siswa.

Teknik penilaian sikap ini tidak dapat dilihat secara langsung karena penilaian ini dilakukan secara diam-diam oleh guru berdasarkan pengamatan (observasi) mengenai sikap siswa dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas, berdasarkan pertanyaan langsung dengan siswa, dan kemudian berdasarkan catatan perkembangan siswa. Teknik penilaian tersebut bersifat insidental, maksudnya disini bahwa penilaian tersebut dapat dilakukan kapanpun.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian sikap merupakan teknik penilaian yang sulit, karena yang dinilai bukan satu atau dua orang siswa

melainkan banyak siswa. Setiap siswa memiliki sikap yang berbeda-beda, bahkan tidak sama setiap harinya. Salah satu yang menjadi hambatan dalam penilaian sikap ini adalah banyaknya jumlah siswa dan juga guru tidak hafal semua nama siswanya, sehingga penilaian menjadi lebih sulit.

Hambatan tersebut menjadi tidak berarti ketika didukung dengan kondisi dan lingkungan sekolah. Kondisi dan lingkungan sekolah memang sangat penting mempengaruhi proses pembelajaran didalamnya. Apabila sekolah memiliki kondisi dan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya pembelajaran, maka pembelajaran akan efektif termasuk dalam evaluasi hasil pembelajaran siswa.

Pada umumnya teknik penilaian Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi pendidikan moral di SMPIT Ihsanul Fikri Magelang sudah sesuai dengan penilaian afektif. Teknik-teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar sudah mengacu pada Standar Penilaian. Bahwa untuk penilaian sikap, Guru Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. Adanya instrument penilaian hasil belajar sebagai pedoman dalam penilaian yang akan diukur.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diupayakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun dalam kenyataannya penelitian ini memiliki beberapa

keterbatasan. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu yang saat itu diprioritaskan untuk mempersiapkan siswa kelas IX yang akan ujian, menjadi penyebab tidak disertakannya kelas IX sebagai subjek penelitian.
2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMPIT Ihsanul Fikri Magelang lebih mengutamakan minat siswa, pemahaman siswa dan ketercapaian materi dalam proses pembelajaran dari pada merancang pembelajaran yang tertuang dalam Renacana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).